

Perempuan di Bawah Bayang-Bayang Proyek Strategis Nasional: Relasi Gender, Krisis Air, dan Ketahanan Pangan Komunitas Petani di Desa Kedawung, Jumapolo, Karanganyar

Triana Rahmawati¹, Ahmad Zuber², Theofilus Apolinaris Suryadinata³, Aris Arif Mundayat⁴, Syahri Maghfirohtika⁵

¹Universitas Sebelas Maret, trianarahmawati@staff.uns.ac.id

²Universitas Sebelas Maret, a.zuber@staff.uns.ac.id

³Universitas Sebelas Maret, ta_suryadinata@staff.uns.ac.id

⁴Universitas Sebelas Maret, risrif@staff.uns.ac.id

⁵Universitas Sebelas Maret, syahri_maghfiroh@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Proyek Strategis Nasional (PSN) pada sektor infrastruktur pengairan menjadi isu penting dalam kajian relasi gender dan tata kelola sumber daya alam karena pembangunan waduk dan sistem irigasi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan ketahanan pangan, tetapi juga memengaruhi distribusi beban adaptasi dan akses terhadap pengambilan keputusan. Pembangunan infrastruktur tersebut selama ini lebih banyak diposisikan sebagai solusi atas krisis pangan dan ketimpangan akses air, namun masih menyisakan pertanyaan mengenai siapa yang paling menanggung dampak krisis, bagaimana strategi adaptasi masyarakat dibangun, serta sejauh mana perempuan memperoleh ruang dalam tata kelola sumber daya air. Artikel ini bertujuan mengkaji konsekuensi sosial PSN bidang pengairan terhadap relasi gender dan strategi ketahanan pangan pada komunitas petani di Desa Kedawung, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan memainkan peran adaptif yang sentral dalam mengatasi krisis air melalui pengelolaan kebutuhan rumah tangga dan dukungan terhadap aktivitas pertanian, tetapi kontribusi tersebut belum memperoleh pengakuan dalam forum-forum kelembagaan. Ketidakhadiran PSN secara tepat waktu mendorong masyarakat membangun sistem gilir air berbasis gotong royong sebagai mekanisme adaptasi lokal yang mencerminkan nilai keadilan komunitas. Di sisi lain, krisis air memperkuat beban kerja ganda perempuan, sementara penyelesaian struktural terus mengalami penundaan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan PSN tidak hanya ditentukan oleh tersedianya infrastruktur fisik, tetapi juga oleh kemampuannya mentransformasi relasi gender yang belum setara dalam tata kelola sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan sepuluh petani laki-laki, satu perwakilan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), satu perwakilan Kelompok Wanita Tani (KWT), observasi partisipatif, serta wawancara dengan delapan pemangku kepentingan. Kredibilitas temuan diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode, sedangkan analisis data dilakukan menggunakan perspektif feminist political ecology.

Kata Kunci: *Proyek Strategis Nasional; Relasi gender; Krisis air; Ketahanan pangan; feminist political ecology; Komunitas petani*

1. PENDAHULUAN

Ketimpangan gender dalam tata kelola sumber daya alam merupakan persoalan struktural yang berakar pada relasi kuasa historis, spasial, dan institusional. Relasi tersebut terbentuk melalui praktik sosial, hukum adat, dan kebijakan negara yang secara sistematis menempatkan laki-laki sebagai subjek utama dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya, sedangkan perempuan diposisikan sebagai pihak pendukung meskipun memiliki kontribusi yang tidak kalah signifikan. Dalam pengelolaan sumber daya alam, perempuan berperan penting dalam pengelolaan lahan, air, dan hutan, baik pada tingkat rumah tangga maupun komunitas (Erianto dkk., 2025). Peran tersebut meliputi pengambilan keputusan terkait alokasi air rumah tangga, pemilihan benih dan pola tanam, hingga pengumpulan hasil hutan untuk kebutuhan konsumsi maupun penjualan. Namun demikian, keragaman dan intensitas kerja perempuan belum tercermin dalam struktur kelembagaan formal yang mengatur akses dan kontrol terhadap sumber daya alam.

Fenomena tersebut juga tercermin pada tingkat global. Perempuan masih banyak bekerja di sektor pertanian yang bersifat musiman, informal, paruh waktu, dan bergaji rendah dengan akses terbatas terhadap perlindungan sosial. Hampir 60 persen pekerjaan perempuan secara global berada pada sektor ekonomi informal, sedangkan di negara berpenghasilan rendah angkanya mencapai lebih dari 90 persen (UN Women, 2024). Di sektor agrifood, perempuan mencakup 36 persen tenaga kerja, hampir setara dengan laki-laki yang mencapai 38 persen (FAO, 2023). Meskipun demikian, kesetaraan partisipasi tersebut tidak diikuti oleh kesetaraan kualitas pekerjaan. Perempuan masih menghadapi ketimpangan dalam jenis pekerjaan, tingkat upah, serta akses terhadap sumber daya produktif seperti lahan, kredit, dan teknologi (FAO, 2023). Ketimpangan tersebut saling memperkuat sehingga membentuk siklus marginalisasi yang sulit diputus tanpa intervensi struktural.

Pola yang sama juga terjadi di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa perempuan menyumbang sekitar 30,57 persen tenaga kerja di sektor pertanian. Selain terlibat dalam kegiatan produksi pertanian, perempuan juga menjalankan pekerjaan domestik dan reproduktif yang umumnya tidak tercatat sebagai aktivitas ekonomi. Meskipun memberikan kontribusi yang besar, perempuan masih memiliki keterwakilan yang rendah dalam berbagai forum pengambilan keputusan, seperti kelompok tani, perkumpulan petani pemakai air, maupun musyawarah desa. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh norma patriarki, ketimpangan akses ekonomi, dan struktur kelembagaan yang masih berorientasi pada laki-laki sebagai kepala rumah tangga.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika pembangunan infrastruktur pengairan mengalami keterlambatan. Salah satu contohnya terjadi pada Proyek Strategis Nasional (PSN) bidang pengairan di Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, pemerintah menargetkan pembangunan 61 bendungan, namun hingga akhir tahun 2022 baru 43 bendungan yang selesai dibangun, sementara Waduk Jelantah di Kabupaten Karanganyar belum memasuki tahap konstruksi (Kementerian PUPR,

2023). Kecamatan Jumapolo, yang menjadi lokasi penelitian, termasuk wilayah dengan tingkat kerentanan pangan sedang hingga tinggi akibat keterbatasan irigasi teknis yang menyebabkan produktivitas pertanian berfluktuasi (BPS Jawa Tengah, 2023). Kondisi tersebut diperburuk oleh perubahan iklim yang memperpanjang musim kemarau di Jawa Tengah (BMKG, 2022; IPCC, 2022). Hasil survei pendahuluan menunjukkan bahwa perempuan di Desa Kedawung harus menambah dua hingga empat jam kerja setiap hari selama musim kemarau untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga sekaligus mendukung aktivitas pertanian. Kontribusi tersebut belum memperoleh pengakuan yang memadai dalam statistik ketenagakerjaan maupun forum kelembagaan desa. Dengan demikian, keterlambatan pembangunan infrastruktur pengairan tidak hanya menimbulkan persoalan teknis dan ekonomi, tetapi juga memperlihatkan adanya dimensi gender yang penting untuk dikaji.

Untuk memahami persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif *feminist political ecology* sebagai kerangka analisis (Sultana, 2022). Perspektif ini tidak hanya menjelaskan pembagian peran laki-laki dan perempuan, tetapi juga menelaah bagaimana relasi kuasa, kebijakan negara, kapitalisme, dan norma patriarki membentuk ketimpangan akses terhadap sumber daya alam sekaligus memengaruhi kemampuan adaptasi masyarakat (Flaminio dkk., 2022; Najjar dkk., 2023). Dalam konteks penelitian ini, perspektif tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan Proyek Strategis Nasional bidang pengairan berpotensi mereproduksi ketidaksetaraan gender dalam tata kelola sumber daya air.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas dampak sosial pembangunan infrastruktur terhadap masyarakat lokal. Namun demikian, penelitian yang mengintegrasikan perspektif *feminist political ecology* dalam menganalisis dampak keterlambatan Proyek Strategis Nasional bidang pengairan terhadap relasi gender masih sangat terbatas. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya ruang pengembangan kajian mengenai hubungan antara kebijakan pembangunan, pengelolaan sumber daya air, dan ketimpangan gender pada komunitas agraris.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dampak krisis air akibat keterlambatan Proyek Strategis Nasional terhadap relasi gender pada komunitas petani di Desa Kedawung, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini juga menganalisis peran gender dalam strategi adaptasi masyarakat serta implikasi kebijakan Proyek Strategis Nasional terhadap transformasi maupun keberlanjutan ketimpangan gender. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pengelolaan sumber daya air yang lebih inklusif serta mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 5 (Keseimbangan Gender), dan SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal (Yin, 2018) untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika gender dan tata kelola air pada tingkat komunitas. Lokasi penelitian berada di Desa Kedawung, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, yang merupakan desa pegunungan dengan

karakteristik lahan terasering dan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertanian padi dan palawija.

Data primer dikumpulkan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan 19 partisipan, terdiri atas tujuh pemangku kepentingan, satu perwakilan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), satu perwakilan Kelompok Wanita Tani (KWT), serta sepuluh petani laki-laki dengan latar belakang yang beragam, meliputi buruh tani, petani pemilik lahan, dan pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Dari komposisi tersebut, dua dari tiga sesi FGD yang menjadi sumber utama kutipan pada bagian hasil diikuti seluruhnya oleh partisipan laki-laki. Keterbatasan tersebut diakui secara terbuka karena informasi mengenai pengalaman domestik dan pengelolaan air rumah tangga perempuan pada bagian tersebut sebagian besar disampaikan melalui perspektif informan laki-laki, bukan berdasarkan kesaksian langsung perempuan.

FGD dilaksanakan di Desa Kedawung dan difasilitasi oleh asisten peneliti dari Universitas Sebelas Maret (UNS). Data hasil FGD dilengkapi dengan observasi lapangan yang dilakukan selama proses penelitian untuk mendokumentasikan interaksi antarpartisipan, dinamika diskusi, serta praktik pengelolaan air yang diamati secara langsung. Panduan diskusi mencakup kondisi ketersediaan air dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir, strategi adaptasi masyarakat, pembagian peran anggota rumah tangga dalam pengelolaan pertanian, dampak kegagalan panen terhadap kehidupan keluarga, serta harapan masyarakat terhadap program pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air.

Analisis data dilakukan melalui proses pengodean awal (*initial coding*) dan analisis tematik yang mendokumentasikan kode awal, kutipan *verbatim*, serta catatan analitis secara sistematis sebagai bagian dari *audit trail*. Untuk meningkatkan kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi peneliti. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan perspektif petani laki-laki, perwakilan KWT, perwakilan P3A, dan para pemangku kepentingan. Triangulasi metode dilakukan dengan mengintegrasikan hasil FGD, observasi lapangan, dan wawancara mendalam (*Key Informant Interview/KII*). Sementara itu, triangulasi peneliti dilakukan melalui perbandingan hasil fasilitasi yang dilakukan oleh anggota tim peneliti yang berbeda untuk memastikan konsistensi interpretasi antarpemeliti.

3. ANALISIS DATA

3.1. Krisis Air dan Absennya PSN: Antara Harapan dan Kenyataan

Temuan lapangan menunjukkan bahwa Desa Kedawung telah mengalami tekanan ketersediaan air yang meningkat secara signifikan dalam satu dekade terakhir. Dua faktor utama penyebab krisis teridentifikasi: pertama, pengalihan sumber mata air dari fungsi irigasi pertanian ke kebutuhan air minum domestik melalui program Sistem Penyediaan Air berbasis Mata Air (SIPAS); kedua, penebangan liar yang menggundulkan wilayah hulu dan mengurangi kemampuan tangkapan air pegunungan. Kedua faktor ini bekerja secara kumulatif sehingga debit sumber air yang tersedia untuk pertanian menyusut drastis, terutama pada musim kemarau (mareng) yang berlangsung antara Juni hingga Desember.

Selama kurang lebih 10 tahun terakhir ini, saya merasa keberatan, karena sumber-sumber telah dialirkan ke rumah-rumah untuk konsumsi air minum, berkurangnya lebih banyak dan juga banyak penebangan kayu secara liar. Jadi gundul, penahanan air di sana jadi berkurang. Sampai sekarang itu petani kalau musim sudah mareng atau menginjak kemarau itu sulit sekali (Informan, FGD, Kedawung, Mei 2026).

Krisis ini diperparah oleh ketidakpastian pola musim yang semakin sulit diprediksi. Sutarmi (KII Balai Desa Kedawung, 11 Mei 2026) menggambarkan kekeringan panjang tahun 2019 sebagai titik ekstrem yang melampaui siklus normal enam bulan. Kondisi ini menciptakan ketimpangan spasial yang tajam: dusun yang memiliki akses saluran irigasi teknis masih dapat mempertahankan produksi, sementara dusun yang mengandalkan air hujan mengalami kegagalan pangan total. Temuan ini selaras dengan data BPS Jawa Tengah (2023) yang menempatkan Kecamatan Jumapolo dalam kawasan dengan indeks kerentanan pangan sedang-tinggi.

Di tengah tekanan ini, komunitas mengetahui adanya rencana pembangunan Waduk Jelantah yang diproyeksikan memberi manfaat empat serangkai: wisata, pengairan pertanian, air minum, dan pengendalian banjir. Namun kenyataannya berbeda. Paidi menegaskan bahwa program tersebut.

Mangkrak, tidak ada tindak lanjut, bahkan belum diresmikan (Informan, FGD, Kedawung, Mei 2026).

Paradoksnya, proses konstruksi yang terhenti justru menyebabkan kekeringan sementara di wilayah hulu akibat pembendungan yang tidak tuntas petani menanggung risiko dari proyek yang seharusnya menolong mereka. Proses pembendungan yang tidak diselesaikan menciptakan gangguan hidrologi di wilayah hulu, di mana aliran air yang sebelumnya mengairi sawah-sawah petani terhambat oleh konstruksi setengah jadi, sementara sistem irigasi lama sudah terlanjur terganggu namun sistem baru belum berfungsi sama sekali. Akibatnya, petani menghadapi kekeringan sementara yang tidak mereka kenal sebelumnya bukan karena kemarau atau faktor alam, melainkan karena intervensi pembangunan yang mandek tepat di titik paling krusial. Mereka menanggung kerugian nyata berupa ancaman gagal tanam, berkurangnya produksi, dan ketidakpastian musim tanam berikutnya, tanpa ada kompensasi maupun kepastian jadwal penyelesaian dari pihak manapun. Paradoks ini memperlihatkan ironi pembangunan yang tajam: sebuah infrastruktur yang dirancang sebagai solusi justru bertransformasi menjadi sumber masalah baru bagi komunitas yang seharusnya menjadi penerima manfaat utamanya. Komunitas petani Kedawung dengan demikian terjebak dalam zona paling tidak menguntungkan sudah melepas kondisi lama yang relatif stabil, tetapi belum sampai pada kondisi baru yang dijanjikan, menanggung beban tanpa kepastian kapan keadaan ini akan berakhir.

Ketidakhadiran PSN yang tepat waktu memiliki implikasi berlapis bagi strategi pertanian rumah tangga. Pertama, petani tidak dapat melakukan perencanaan musim tanam jangka menengah karena ketidakpastian pasokan air. Kedua, alternatif teknis seperti sumur bor terbukti tidak layak secara ekonomi.

"Biaya listrik pompa per sesi tidak sebanding dengan nilai gabah yang dihasilkan, sehingga petani memilih tidak menggunakannya" (Informan, FGD, Kedawung, Mei 2026).

Selain itu, seluruh beban adaptasi diserahkan kepada komunitas tanpa dukungan institusional yang memadai sebuah kondisi disebut sebagai konsekuensi klasik absennya negara dalam komunitas agraris. Kondisi tersebut menegaskan bahwa adaptasi masyarakat bukan merupakan indikator keberhasilan pembangunan, melainkan cerminan dari kekosongan tanggung jawab negara dalam melindungi komunitas agraris yang terdampak.

3.2. Sistem Gilir Air: Keadilan Lokal yang Menyembunyikan Beban Gender

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kedawung mengembangkan sistem gilir air (rotasi irigasi) sebagai strategi adaptasi terhadap kelangkaan struktural air irigasi. Sistem tersebut disusun berdasarkan kesepakatan kolektif dan diterapkan dalam dua tingkatan, yaitu giliran berbasis hari pasaran pada tingkat antarkelompok dan giliran berbasis jam pada tingkat petak sawah. Ketika debit air mencukupi, pembagian dilakukan berdasarkan hari pasaran, sedangkan pada musim kemarau yang ekstrem diterapkan sistem giliran per jam secara lebih ketat. Keberhasilan mekanisme tersebut bertumpu pada konsensus sosial yang telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat berjalan tanpa paksaan formal.

Sebagaimana diungkapkan salah seorang informan:

"Dibagi secara waktu, satu jam dan satu jam, yaudah cuma dapat itu. Kalau waktunya sudah habis belum selesai, belum penuh, gantian. Itu untuk menghemat air dan pemerataan. Jadi tidak ada yang menang-menangan." (Informan, FGD, Kedawung, Mei 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem gilir air dibangun melalui kesepakatan bersama yang memberikan hak kepada para pengguna sumber daya untuk menyusun, menjalankan, dan mengubah aturan secara kolektif. Kondisi ini sejalan dengan konsep *co-construction of rules* yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam tata kelola sumber daya bersama (Hoogesteger dkk., 2024). Efektivitas sistem juga diperkuat oleh penerapan sanksi sosial. Petani yang melanggar jadwal giliran tidak memperoleh jatah air selama beberapa hari, sedangkan konflik diselesaikan melalui musyawarah yang difasilitasi oleh ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagai mediator yang dipercaya masyarakat. Mekanisme tersebut mampu menjaga hubungan sosial antarpetani sehingga konflik perebutan air tidak berkembang menjadi konflik terbuka.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Agus:

"Kalau di sini alhamdulillah aman-aman." (Informan, FGD, Kedawung, Mei 2026).

Meskipun demikian, analisis menggunakan perspektif *feminist political ecology* menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola tersebut masih menyisakan ketimpangan gender. Seluruh proses perencanaan, pengoperasian, dan pengambilan keputusan dalam sistem gilir air didominasi oleh laki-laki, baik sebagai petani, pengurus P3A, maupun anggota Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Sementara itu, kebutuhan air domestik yang menjadi tanggung

jawab utama perempuan belum menjadi bagian dari pertimbangan dalam penyusunan sistem distribusi air. Temuan ini menunjukkan bahwa kontrol terhadap sumber daya produktif masih terkonsentrasi pada aktor laki-laki, sedangkan kontribusi perempuan lebih banyak diwujudkan melalui kerja reproduktif dan pengelolaan rumah tangga yang menopang keberlangsungan ekonomi keluarga, tetapi belum memperoleh ruang dalam proses pengambilan keputusan strategis.

Kondisi tersebut juga tercermin dalam komposisi partisipan penelitian. Seluruh partisipan FGD yang membahas mekanisme pengelolaan irigasi merupakan laki-laki. Meskipun demikian, mereka mengakui pentingnya kontribusi perempuan dalam mendukung aktivitas pertanian.

Sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang informan:

"Ibu-ibu yang mendukung bapak-bapak yang ada di sawah... membantu pengairan, memanen, tetap mendukung." (Informan, FGD, Kedawung, Mei 2026).

Penggunaan istilah "*mendukung*" menunjukkan bahwa kontribusi perempuan masih diposisikan sebagai pelengkap dari aktivitas pertanian yang dianggap menjadi ranah utama laki-laki. Pengakuan tersebut bersifat informal dan belum diwujudkan dalam bentuk representasi kelembagaan, kompensasi ekonomi yang setara, maupun keterlibatan perempuan dalam forum pengambilan keputusan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Meinzen-Dick dan Zwarteveen (1998; 339) bahwa kontribusi perempuan dalam pengelolaan sumber daya air sering kali diakui secara sosial, tetapi belum memperoleh legitimasi dalam struktur kelembagaan formal.

3.3. Perempuan sebagai Manajer Krisis yang Tak Terlihat

Hasil FGD dan wawancara mendalam menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam strategi adaptasi masyarakat terhadap krisis air. Meskipun demikian, peran tersebut belum memperoleh pengakuan secara institusional, belum tercatat dalam statistik formal, serta belum terepresentasi dalam forum pengambilan keputusan. Penelitian ini mengidentifikasi sedikitnya tiga peran utama perempuan dalam membangun ketahanan rumah tangga dan komunitas.

Peran pertama adalah sebagai manajer ketahanan pangan rumah tangga. Perempuan bertanggung jawab mengelola stok pangan, mengatur prioritas pengeluaran keluarga ketika terjadi gagal panen, serta memastikan kebutuhan dasar tetap terpenuhi meskipun pendapatan pertanian mengalami penurunan.

Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang informan:

"Ibu-ibu pintar-pinter mengelola keuangan, biar bisa merata." (Informan, FGD, Kedawung, Mei 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap kemampuan perempuan dalam mengelola ekonomi rumah tangga. Namun, di balik pengakuan tersebut terdapat beban yang tidak ringan, seperti mengurangi konsumsi pribadi, melakukan negosiasi pinjaman dengan tetangga, serta mengorbankan kebutuhan diri demi keberlangsungan keluarga. Temuan ini diperkuat oleh keterangan Sutarmi (KII, Balai Desa Kedawung, 11 Mei 2026)

yang menjelaskan bahwa perempuan yang mengelola usaha mikro, seperti produksi keripik, tempe, dan tahu, menjadi penopang utama ekonomi keluarga ketika aktivitas pertanian terhenti. Meskipun demikian, kontribusi tersebut belum tercatat dalam laporan ketahanan pangan desa.

Peran kedua adalah sebagai pekerja pertanian tanpa upah tunai. Perempuan terlibat secara aktif dalam berbagai pekerjaan pertanian, seperti menanam padi, menyiangi gulma, dan memanen hasil pertanian. Namun, imbalan yang diterima umumnya berupa natura, seperti gabah, bukan upah dalam bentuk uang.

Sebagaimana diungkapkan oleh informan:

"Kita mencari tenaga kerja perempuan untuk menanam, memetikanya, itu kan berupa barang upahnya... nggak duit." (Informan, FGD, Kedawung, Mei 2026).

Sistem pembayaran dalam bentuk natura tersebut memiliki konsekuensi terhadap posisi ekonomi perempuan. Selain membatasi kepemilikan pendapatan tunai yang dapat dikelola secara mandiri, kontribusi ekonomi perempuan juga tidak tercatat dalam statistik ketenagakerjaan resmi. Temuan ini sejalan dengan konsep feminisasi kerja pertanian yang dikemukakan Zwarteveen (1997), yaitu meningkatnya keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pertanian tanpa diikuti pengakuan yang memadai terhadap nilai ekonomi kerja mereka.

Peran ketiga adalah sebagai pendorong diversifikasi ekonomi keluarga sekaligus penyangga (*buffer*) ketika terjadi krisis. Pada saat gagal panen, perempuan mendorong anggota keluarga untuk mencari sumber penghasilan alternatif di luar sektor pertanian.

Sebagaimana disampaikan oleh Agus:

"Ibu-ibu kasih dorongan untuk cari kerja yang lain." (Agus, Kedawung, 11 Mei 2026).

Selain memberikan dorongan, perempuan juga mengembangkan berbagai usaha ekonomi berbasis rumah tangga. Pada masa kekeringan tahun 2019, perempuan di Desa Kedawung mengaktifkan usaha mikro, seperti pengolahan pangan lokal, berdagang sayur keliling, produksi keripik, tempe, dan tahu sebagai sumber penghasilan alternatif ketika produksi padi mengalami penurunan. Meskipun perempuan berperan sebagai penggagas sekaligus pelaksana strategi tersebut, pengelolaan pendapatan dan keputusan mengenai alokasi modal masih didominasi oleh laki-laki. Kondisi ini menunjukkan bahwa relasi kuasa dalam rumah tangga tetap berlangsung secara asimetris.

Secara keseluruhan, ketiga peran tersebut memperlihatkan bahwa perempuan memikul beban adaptasi yang sangat besar dalam menghadapi krisis air dan kegagalan panen. Namun, beban tersebut dikonstruksikan secara sosial sebagai kemampuan yang dianggap "alamiah" dimiliki perempuan, sehingga tidak dipandang sebagai bentuk kerja tambahan yang memerlukan pengakuan maupun perlindungan. Dalam perspektif *feminist political ecology*, proses naturalisasi tersebut merupakan mekanisme ideologis yang menyebabkan kerja reproduktif perempuan menjadi tidak terlihat (*invisible labor*) dan mengurangi dorongan bagi negara maupun lembaga lokal untuk merancang kebijakan yang secara khusus merespons kerentanan perempuan. Temuan ini memperkuat argumentasi Sultana (2022) dan Najjar dkk.

(2023) bahwa anggapan mengenai kemampuan "alamiah" perempuan dalam mengelola krisis justru berkontribusi pada absennya intervensi kebijakan yang responsif gender.

3.4. Gotong Royong sebagai Modal Sosial, namun Berstruktur Gender

Hasil FGD, wawancara dengan kepala desa, dan proses *coding* data menunjukkan bahwa gotong royong merupakan infrastruktur sosial informal yang menjadi penopang utama ketahanan pangan masyarakat Desa Kedawung. Praktik saling meminjam bahan pangan, berbagi hasil kebun tanpa transaksi uang, serta solidaritas antartetangga membentuk jaringan pengaman sosial yang telah berfungsi jauh sebelum hadirnya berbagai program pemerintah.

Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang informan:

"Di kampung sini hidup itu bukan hidup sendiri, tapi hidup bersama. Kalau kurang apa kita pinjam tetangga, dari tetangga saya kasih. Kalau untuk makan, petani di sini paling ya minjem. Mau nyayur enggak ada sayur, saya nanam, ambil aja, enggak usah bayar." (Informan, FGD, Kedawung, Mei 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa gotong royong tidak hanya dipahami sebagai nilai budaya, tetapi juga menjadi mekanisme adaptasi masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan krisis air. Solidaritas antarmasyarakat memungkinkan kebutuhan dasar tetap terpenuhi meskipun produksi pertanian mengalami penurunan akibat keterbatasan air.

Jika dianalisis menggunakan perspektif *feminist political ecology*, praktik gotong royong tersebut mengandung paradoks gender. Di satu sisi, gotong royong mencerminkan modal sosial yang kuat dan menjadi fondasi ketahanan komunitas. Penelitian Situmeang dan Aflaha (2022) menunjukkan bahwa perempuan perdesaan mengembangkan berbagai strategi adaptasi berbasis modal sosial dalam menghadapi perubahan iklim, meskipun kontribusi tersebut sering kali tidak diakui sebagai bentuk perjuangan komunitas. Di sisi lain, berbagai aktivitas yang menopang keberlangsungan gotong royong, seperti berbagi makanan, merawat tetangga yang sakit, menjaga kebutuhan keluarga, dan mengelola distribusi bantuan, dalam praktiknya banyak dilakukan oleh perempuan. Namun, kontribusi tersebut hampir tidak pernah muncul dalam diskursus publik mengenai gotong royong sebagai praktik sosial (Flaminio dkk., 2022). Dengan demikian, gotong royong sering dipahami sebagai bentuk solidaritas yang bersifat netral gender, padahal keberlangsungannya sangat bergantung pada kerja reproduktif perempuan yang tidak terlihat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa setelah tersedianya akses air yang lebih baik melalui Sistem Penyediaan Air (SIPAS), tingkat gotong royong dan kedekatan sosial masyarakat justru mengalami peningkatan.

Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang informan:

"Malah justru lebih kompak... gotong royong semakin dekat." (Informan, FGD, Kedawung, Mei 2026).

Meskipun demikian, peningkatan kohesi sosial tersebut perlu dipahami secara kritis. Dalam perspektif *feminist political ecology*, menguatnya solidaritas komunal belum tentu diikuti oleh perubahan struktur relasi kuasa. Kohesi sosial yang tampak dapat saja hanya

merepresentasikan penguatan solidaritas pada tingkat komunitas, sementara mekanisme pengambilan keputusan dan distribusi kewenangan tetap didominasi oleh laki-laki. Dengan kata lain, penguatan modal sosial belum secara otomatis menghasilkan tata kelola sumber daya yang lebih setara secara gender.

Pandangan tersebut sejalan dengan Colfer dkk. (2017) yang menekankan bahwa perubahan dalam tata kelola sumber daya bersama harus dianalisis melalui distribusi kekuasaan dan manfaat yang diterima setiap kelompok sosial. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan apakah institusi-institusi tersebut telah menghilangkan bias gender atau justru masih mempertahankan mekanisme yang membatasi keterlibatan perempuan. Dalam konteks ini, perempuan berpotensi tetap diposisikan sebagai penerima manfaat (*beneficiary*) daripada sebagai aktor yang memiliki kewenangan dalam proses pengambilan keputusan. Colfer dkk. (2017) menyebut kondisi tersebut sebagai *often invisible power relations*, yaitu relasi kuasa yang bekerja secara tidak kasat mata dalam menentukan siapa yang memperoleh manfaat dari suatu intervensi pembangunan.

Temuan ini menunjukkan bahwa meningkatnya gotong royong pascaimplementasi SIPAS tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan. Penguatan kohesi sosial perlu diikuti dengan redistribusi kewenangan dan perluasan ruang partisipasi perempuan dalam tata kelola sumber daya air. Tanpa perubahan tersebut, harmoni sosial berpotensi hanya menjadi bentuk stabilisasi ketimpangan yang tetap mempertahankan relasi kuasa patriarkal. Kondisi ini sejalan dengan argumentasi Fraser (1995) bahwa pengakuan (*recognition*) tanpa disertai redistribusi (*redistribution*) tidak mampu menghilangkan subordinasi, melainkan hanya mereproduksinya dalam bentuk yang lebih halus.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa krisis air akibat keterlambatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) bidang pengairan di Desa Kedawung tidak berdampak secara netral terhadap laki-laki dan perempuan. Perempuan menanggung beban adaptasi yang lebih besar, baik dalam pengelolaan rumah tangga maupun aktivitas produktif, tetapi kontribusi tersebut belum memperoleh pengakuan yang setara dalam kelembagaan lokal, proses perencanaan pembangunan, maupun statistik resmi. Di sisi lain, masyarakat mengembangkan mekanisme adaptasi berbasis gotong royong dan sistem gilir air yang mampu memperkuat ketahanan komunitas. Namun, mekanisme tersebut masih beroperasi dalam struktur relasi gender yang cenderung patriarkal sehingga partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan tetap terbatas.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan tiga kontribusi. Pertama, penelitian ini memperkuat perspektif *feminist political ecology* dengan menunjukkan bahwa beban adaptasi perempuan pada saat krisis air merupakan bentuk ketidaksetaraan yang terus direproduksi melalui minimnya pengakuan terhadap kerja perempuan dalam institusi maupun statistik resmi. Kedua, penelitian ini memperluas kajian mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan menunjukkan bahwa keterlambatan pembangunan infrastruktur tidak hanya berdampak pada aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga menghasilkan konsekuensi yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme

adaptasi lokal, seperti gotong royong dan sistem gilir air, dapat memperkuat ketahanan komunitas sekaligus tetap mempertahankan relasi kuasa yang tidak setara apabila tidak disertai perubahan kelembagaan yang lebih inklusif.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar analisis gender diintegrasikan dalam seluruh siklus perencanaan dan evaluasi Proyek Strategis Nasional bidang pengairan. Selain itu, diperlukan peningkatan keterwakilan perempuan dalam kelembagaan pertanian dan pengelolaan irigasi, penguatan program pemberdayaan ekonomi perempuan, serta penelitian lanjutan yang secara langsung melibatkan perspektif perempuan melalui pendekatan partisipatif yang responsif gender.

REFERENSI

- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 2022. *Laporan Iklim Tahunan Jawa Tengah 2022*. Jakarta; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia 2023*. Jakarta; Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. 2023. *Statistik Ketahanan Pangan Kabupaten Karanganyar 2023*. Semarang; Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.
- Braun, Virginia., dan Victoria Clarke. 2006. *Using Thematic Analysis in Psychology*. (Qualitative Research in Psychology Vol. 3 No. 2). London; Routledge.
- Buechler, Stephanie. 2016. Gendered Vulnerabilities and Grassroots Adaptation Initiatives in Home Gardens and Small Orchards in Northwest Mexico. (Ambio Vol. 45 Supplement 3). Cham; Springer.
- Colfer, Carol J. Pierce., Bimbika Sijapati Basnett., dan Marlène Elias (Ed.). 2016. *Gender and Forests: Climate Change, Tenure, Value Chains and Emerging Issues*. London; Routledge.
- Erianto, F., Jumadi, M., dan Suryaningsi. 2025. Ketidaksetaraan Gender dalam Partisipasi Pengambilan Keputusan Pengelolaan Sumber Daya Alam. (Doh Gisin Vol. 2 No. 2). Samarinda; Universitas Mulawarman.
- Food and Agriculture Organization. 2023. *The Status of Women in Agrifood Systems*. Rome; FAO.
- Flaminio, Sarah., Rouillé-Kielo, G., dan Le Visage, S. 2022. Waterscapes and Hydrosocial Territories: Thinking Space in Political Ecologies of Water. (Progress in Environmental Geography Vol. 1 No. 1–2). London; SAGE Publications.
- Intergovernmental Panel on Climate Change. 2022. *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. Cambridge; Cambridge University Press.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2023. *Laporan Progres Pembangunan Bendungan Proyek Strategis Nasional Tahun 2020–2023*. Jakarta; Kementerian PUPR.
- Meinzen-Dick, Ruth., dan Margreet Zwarteveen. 1998. Gendered Participation in Water Management: Issues and Illustrations from Water Users' Associations in South Asia. (Agriculture and Human Values Vol. 15 No. 4). Dordrecht; Springer.
- Najjar, Dina., Hanson Nyantakyi-Frimpong., Ranjan Devkota., dan Amina Bentaibi. 2023. *A Feminist Political Ecology of Agricultural Innovations in Smallholder Farming Systems*. (Geoforum Vol. 146). Amsterdam; Elsevier.

- Putnam, Robert D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York; Simon & Schuster.
- Republik Indonesia. 2020. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Jakarta; Sekretariat Negara.
- Scott, James C. 1985. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven; Yale University Press.
- Sultana, Farhana. 2022. The Unbearable Heaviness of Climate Coloniality. (Political Geography Vol. 99). Amsterdam; Elsevier.
- Yin, Robert K. 2018. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Edisi ke-6. Thousand Oaks, California; SAGE Publications.
- Zwarteveen, Margreet Z. 1997. *A Plot of One's Own: Gender Relations and Irrigated Land Allocation Policies in Burkina Faso*. Colombo; International Irrigation Management Institute.